



DINPERKIM

2021

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
I. PENDAHULUAN	6
A. Tugas dan Fungsi DINPERKIM Kabupaten Banyumas	6
1. Pembentukan	6
2. Tugas dan Fungsi	8
B. Sumber Daya Manusia	9
C. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	12
II. PERENCANAAN KINERJA	17
A. Perencanaan Kinerja DINPERKIM 2021	17
III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Pencapaian Kinerja Organisasi	19
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	19
C. Perbandingan Capaian Indikator PK dengan Tahun Sebelumnya	25
D. Akuntabilitas Keuangan	26
IV. PENUTUP	32
LAMPIRAN (PK DINPERKIM 2021)	35
LAMPIRAN (PK PERUBAHAN DINPERKIM 2021)	36

----- **IKHTISAR EKSEKUTIF** -----

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**).

Berdasarkan **Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, maka **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas** merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Permukiman dan urusan bidang pertanahan; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam tahun 2021 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menetapkan sebanyak 3 (tiga) Tujuan & 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman	<i>Presentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan Dan Permukiman</i>	%	73,80	75,99	102,97
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang</i>	%	99,983	99,983	100,00
		Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	<i>Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang</i>	%	0,017	0,017	100,00

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	%	100,00	100	100,00
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	77,07	79,17	102,72

- ✓ Sasaran 1 tercapai dengan nilai 102,97 %
- ✓ Sasaran 2 tercapai dengan nilai 100,00 %
- ✓ Sasaran 3 tercapai dengan nilai 100,00 %
- ✓ Sasaran 4 tercapai dengan nilai 100,00 %
- ✓ Sasaran 5 tercapai dengan nilai 102,72 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan, dan sangat signifikan .

Prestasi ini cukup menggambarkan kinerja SKPD yang efektif, efisien. Demikian juga dengan Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari 5 Sasaran Tingkat Efektifitas Anggaran Rata-rata sebesar 76,17 %

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-Rata Capaian (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1	102,97	35.983.849.167	98,77
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	1	100,00	858.537.100	96,36
		Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	1	100,00	161.459.575	86,43
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	1	100,00	-	0,00
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	1	102,72	21.509.083.913	99,29

Dari 5 Sasaran Tingkat Efisiensi Anggaran Rata-rata sebesar 24,97 %

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-Rata Capaian (%)	Prosentase Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1	102,97	98,77	4,19
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	1	100,00	96,36	3,64
		Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	1	100,00	86,43	13,57
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	1	100,00	0,00	100,00
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	1	102,72	99,29	3,44

Purwokerto, Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS
ASEKBANG



Dr. Ir. IRAWADI, CES
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 199103 1 007



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi DINPERKIM Kabupaten Banyumas

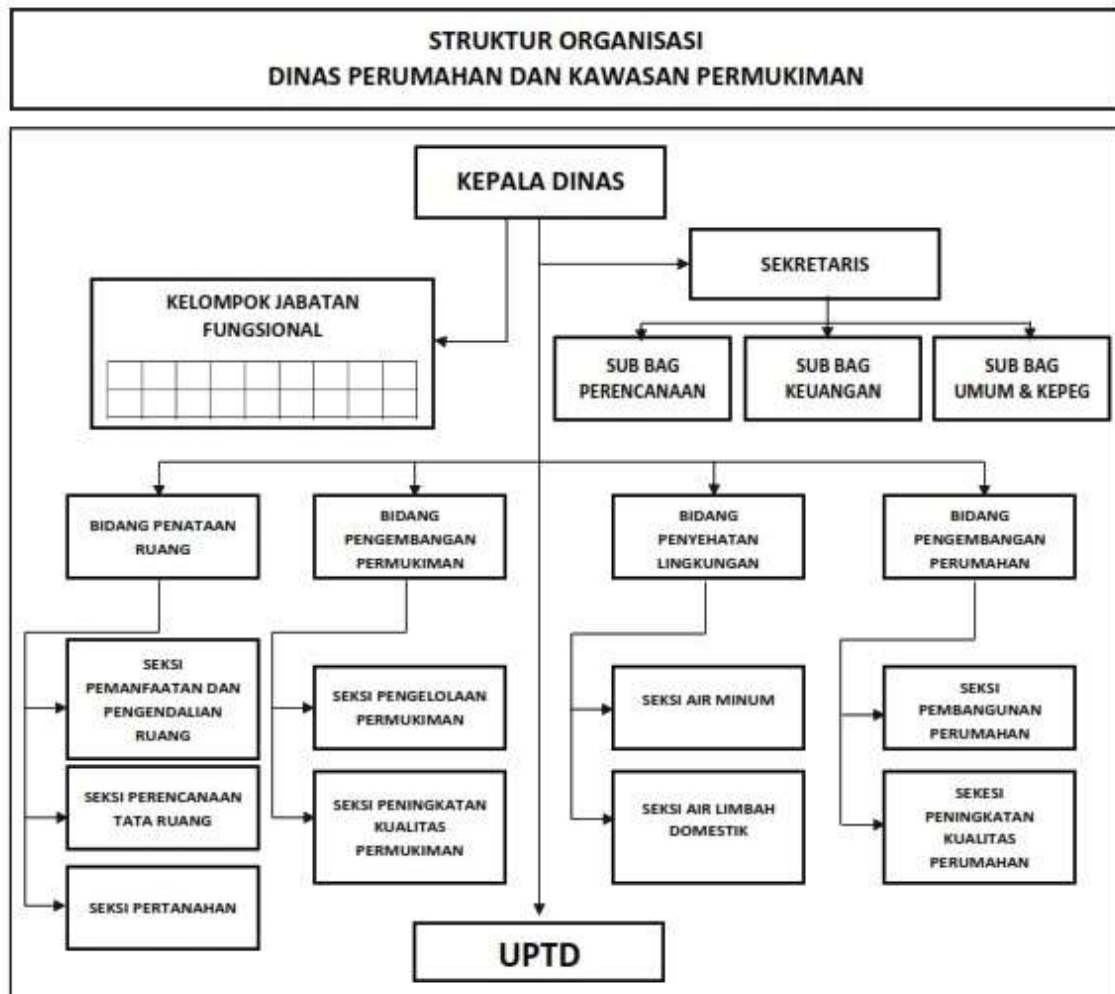
1. Pembentukan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas, dibentuk sesuai dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019** tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan **Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang; dan
 3. Seksi Pertanahan.
- d. Bidang Pengembangan Permukiman, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Permukiman;
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman.
- e. Bidang Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Air Minum;
 2. Seksi Air Limbah Domestik.
- f. Bidang Pengembangan Perumahan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Perumahan;
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS :



2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Permukiman dan urusan bidang pertanahan; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan **Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2020**, dibagi menjadi Fungsi masing-masing bidang yaitu :

1. Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Perumusan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Penataan Ruang dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
 - 1) Perencanaan dan tata ruang;
 - 2) Pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - 3) Pertanahan.
- ✓ Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
 - 1) perencanaan dan tata ruang;
 - 2) pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - 3) pertanahan.
- ✓ Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penataan Ruang;
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penataan Ruang;
- ✓ Pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penataan Ruang;
- ✓ Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penataan Ruang;
- ✓ Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengembangan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Perumusan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Pengembangan Permukiman dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
 - 1) pengelolaan permukiman;
 - 2) peningkatan kualitas permukiman;
- ✓ Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Permukiman dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
 - 1) pengelolaan permukiman;
 - 2) peningkatan kualitas permukiman;
- ✓ Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengembangan Permukiman;
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengembangan Permukiman;
- ✓ Pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengembangan Permukiman;
- ✓ Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengembangan Permukiman;
- ✓ Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penyehatan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Perumusan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Penyehatan Lingkungan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
 - 1) air minum;
 - 2) air limbah domestik;
- ✓ Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Penyehatan Lingkungan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
 - 1) air minum;
 - 2) air limbah domestik;

- ✓ Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penyehatan Lingkungan;
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penyehatan Lingkungan;
- ✓ Pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penyehatan Lingkungan;
- ✓ Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penyehatan Lingkungan;
- ✓ Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengembangan Perumahan, menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Perumusan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Pengembangan Perumahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
 - 1) pembangunan perumahan;
 - 2) peningkatan perumahan;
- ✓ Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Perumahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
 - 1) pembangunan perumahan;
 - 2) peningkatan perumahan;
- ✓ Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengembangan Perumahan;
 - ✓ d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengembangan Perumahan;
 - ✓ e. pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengembangan Perumahan;
 - ✓ f. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengembangan Perumahan;
 - ✓ g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
 - ✓ sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sumber Daya Manusia

Gambaran umum sumber daya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada data berikut :

1. *Keadaan aparatur yang ada di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menurut golongan.*

PNS DINPERKIM	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JML
Kepala Dinas	-	1	-	1	1
Sekretariat	-	9	8	1	18
Bid. Penataan Ruang	-	1	4	1	6
Bid. Pengembangan Permukiman	-	1	5	1	7
Bid. Penyehatan Lingkungan	-	2	3	2	6
Bid. Pengembangan Perumahan	-	1	3	1	5
JUMLAH	-	14	23	7	44

2. *Keadaan personil menurut eselon*

ESELON	JUMLAH
Eselon II B	1 orang
Eselon III A	1 orang
Eselon III B	4 orang
Eselon IV A	11 orang
JUMLAH	17 ORANG

3. *Keadaan personil menurut pendidikan formal*

PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
Pendidikan setingkat S2	7
Pendidikan setingkat S1/D4	19
Pendidikan setingkat D3	3
Pendidikan setingkat SLTA	13
Pendidikan setingkat SLTP	1
Pendidikan setingkat SD	1
JUMLAH	44 ORANG

C. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Identifikasi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

- ✓ Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - a) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.
 - b) Belum optimalnya ketersediaan data untuk keperluan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
 - c) Belum optimalnya kapabilitas dan kompetensi SDM baik perencanaan, keuangan, aset, umum dan kepegawaian maupun pelaksana di lapangan.
- ✓ Masalah terkait bidang Tata Ruang :
 - a) Belum optimalnya penataan pengelolaan tata ruang oleh pelaku usaha/kegiatan.
 - b) Kurangnya keberlanjutan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tata ruang
 - c) Belum optimalnya kajian dan analisis dalam perencanaan tata ruang. Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Kabupaten Banyumas.
- ✓ Masalah terkait bidang Penyehatan Lingkungan:
 - a) Belum optimalnya penanganan penyehatan lingkungan pada kawasan permukiman (air minum dan sanitasi)
 - b) Pengawasan yang kurang optimal karena jumlah TFL sanitasi dan air minum yang terbatas.
 - c) Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan air bersih dan sanitasi.
 - d) Belum optimalnya pengelolaan limbah domestic dan sanitasi.
 - e) Masih rendahnya cakupan akses pelayanan air minum aman, layak dan berkelanjutan.
 - f) Masih rendahnya cakupan akses pelayanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
- ✓ Masalah terkait bidang Pengembangan Permukiman :
 - a) Kurangnya peningkatan dan pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh.
 - b) Kurangnya sarana prasarana publik dan sarana untuk anak di Kawasan perumahan dan Permukiman.

- c) Banyaknya sarana prasarana umum yang ruak dan perlu ditingkatkan/diperbaiki (jalan lingkungan, talud, drainase dan makam umum).
 - d) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sarana publik.
- ✓ Masalah terkait bidang Pengembangan Perumahan:
- a) Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - b) Belum optimalnya sistem pelayanan site plan.
 - c) Belum optimalnya pembinaan kepada para pengembang, agar target penyerahan PSU ke Pemerintah Daerah tercapai.

2. Identifikasi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis berdasarkan Misi Bupati Banyumas dalam RPJMD.

Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan pada masa RENSTRA RANKHIR DINPERKIM 2021-2023 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan Kabupaten Banyumas berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2021-2023 dan memperhatikan perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

3.3.1 MISI 2 (RPJMD) : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;

3.3.2 MISI 5 (RPJMD) : Menciptakan Iklim Investasi yang Berorientasi Perluasan Kesempatan Kerja yang Berbasis Potensi Lokal dan Ramah Lingkungan;

3.3.3 MISI 6 (RPJMD) : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;

Uraian dari ketiga Misi di atas adalah sebagai berikut :

Mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman; yaitu berupa penyediaan sarana sanitasi (drainase dan limbah permukiman), trotoar pedestrian, air minum, jalan lingkungan, dan fasilitas umum yang berhubungan dengan konteks perumahan dan permukiman untuk mendukung layanan kebutuhan dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas permukiman yang sehat dan tertata;

Memperbanyak Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kegiatan sejenis lainnya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan melalui penyediaan database perumahan yang akurat untuk mewujudkan kualitas perumahan yang layak;

Menyediakan informasi tentang tata ruang yang akurat, terbuka dan akuntabel untuk mendukung pengendalian dan pemanfaatan ruang;

Menyediakan pelayanan perencanaan, pelaporan OPD, administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 2:			
<p>Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan</p> <p>Tujuan : peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan</p> <p>Sasaran : pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum optimalnya penanganan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kurangnya dukungan APBD dalam penanganan RTLH ❖ Data base penerima RTLH belum terupdate secara online 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Adanya dukungan anggaran dari pusat dan provinsi berupa dana tranfer untuk peningkatan Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Permukiman ❖ Adanya dukungan anggaran dari Baznas dan Swasta (CSR)

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 5 :			
<p>Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan</p> <p>Tujuan: Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan</p> <p>Sasaran: meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum optimalnya penataan pengelolaan tata ruang oleh pelaku usaha/kegiatan ❖ Kurangnya keberlanjutan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tata ruang ❖ Belum optimalnya kajian dan analisis dalam perencanaan tata ruang. Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota Kabupaten Banyumas. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan Tata Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Adanya regulasi yang mewajibkan pelaku usaha untuk menaati Perda tentang Tata Ruang

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi 6:</p> <p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan</p> <p>Tujuan: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat</p> <p>Sasaran: meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum optimalnya penanganan penyehatan lingkungan pada kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) ❖ Belum optimalnya pengelolaan limbah domestic dan sanitasi. ❖ Masih rendahnya cakupan akses pelayanan air minum aman, layak dan berkelanjutan. ❖ Masih rendahnya cakupan akses pelayanan sanitasi layak dan berkelanjutan. ❖ Kurangnya peningkatan dan pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh. ❖ Banyaknya sarana prasarana umum yang ruak dan perlu ditingkatkan/diperbaiki (jalan lingkungan, talud, drainase dan makam umum) 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Adanya dukungan anggaran dari pusat dan provinsi berupa dana transer untuk peningkatan Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Permukiman



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja DINPERKIM 2021

Perencanaan Jangka Pendek Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021. Perjanjian Kinerja meliputi Tujuan & Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Program dan Kegiatan tahun 2021.

Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator RENSTRA RANKHIR DINPERKIM 2021-2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

PK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman	<i>Presentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan Dan Permukiman</i>	% 73,80
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang</i>	% 100
		Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	<i>Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang</i>	% 0,017
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	<i>Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana</i>	% 100
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	<i>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</i>	% 77,07

Tabel 2.2
RENCANA ANGGARAN

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program yang Mendukung PK	
			Nama	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.291.239.000
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.911.427.000
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.374.309.726
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	61.311.000
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.792.053.054
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	890.930.100
			Program Penatagunaan Tanah	186.804.640
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	0	0
			Program Pengembangan Permukiman	14.894.996.000
			Program Kawasan Permukiman	6.768.112.650
			TOTAL PAGU	59.171.183.170



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.1

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman	<i>Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan Dan Permukiman</i>	%	73,80	75,99	102,97
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang</i>	%	99,983	99,983	100,00
		Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	<i>Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang</i>	%	0,017	0,017	100,00
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	<i>Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana</i>	%	100,00	100	100,00
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	<i>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</i>	%	77,07	79,17	102,72

Keterangan Warna pada Tabel

TIDAK SESUAI
TARGET

SESUAI TARGET

MELAMPAUI
TARGET

Formulasi

Capaian = Realisasi/Target x 100

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

Ada 3 (tiga) Tujuan & 5 (lima) Sasaran Strategis dalam IKU tahun 2021, yang merupakan Tujuan dan Sasaran pada RENSTRA RANKHIR DINPERKIM 2021-2023. Adapun Kelima Sasaran tersebut mempunyai masing-masing 1 (satu) Indikator Kinerja. Penjelasan Capaian Indikator IKU 2021 adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.2

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman	<i>Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan Dan Permukiman</i>	%	73,80	75,99	102,97

Tujuan 1 Sasaran Strategis 1 :

Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat;

Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman;

Untuk mencapai Tujuan 1 Sasaran Strategis 1, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu ***Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman***.

Pencapaian IKU "***Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman***" sampai akhir tahun 2021 adalah sebesar **75,99 %**, ini artinya *Persentase rata-rata IKK Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman* adalah 455,92 persen dibagi *Seluruh Indikator Pendukung (6 Indikator)*.

Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman Pencapaiannya Melebihi Target sebesar 102,97 persen.

Enam (6) Indikator yang mendukung tercapainya Tujuan 1 Sasaran Strategis 1 adalah :

Tabel 3.3

NO	INDIKATOR	TARGET 2021 (%)	REALISASI 2021 (%)
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	74,46	75,51
2	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	88,00	88,83
3	Persentase panjang drainase lingkungan kondisi baik	11,53	11,69
4	Rasio Permukiman Layak Huni	79,90	79,89
5	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	88,89	100,00
6	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100,00

Formulasi = Jumlah Seluruh Target atau Realisasi/6 Indikator =	442,78/5	455,92/5
Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan = dan Kawasan Permukiman	73,80	75,99

Tabel 3.4

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang</i>	%	99,983	99,983	100,00
		Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	<i>Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang</i>	%	0,017	0,017	100,00

Tujuan 2 Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;

Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW;

Untuk mencapai Tujuan 2 Sasaran Strategis 1, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

Pencapaian IKU "*Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang*" sampai akhir tahun 2021 adalah sebesar 99,983 %, ini artinya *Luas Area sesuai Peruntukannya (sesuai RTRW)* adalah 132.735 Hektar dibagi *Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang)* 132.758 Hektar.

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Pencapaiannya Sesuai Target sebesar 100,00 persen.

Tujuan 2 Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;

Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang;

Untuk mencapai Tujuan 2 Sasaran Strategis 2, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu

Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang

Pencapaian IKU "*Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang*" sampai akhir tahun 2021 adalah sebesar 0,017 %, ini artinya *Luas Pemanfaatan tidak sesuai Peruntukan* adalah 23 Hektar dibagi *Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang)* 132.758 Hektar

Tujuan 2, Sasaran Strategis 1 & 2 berhasil dicapai Sesuai Target karena Kesadaran masyarakat yang semakin baik tentang pentingnya penggunaan ruang dan perijinan tata ruang, akan tetapi Sosialisasi tentang Peraturan Tata Ruang tetap dilaksanakan setiap tahun.

Tabel 3.5

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	<i>Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana</i>	%	100,00	100	100,00
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	<i>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</i>	%	77,07	79,17	102,72

Tujuan 3 Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni;

Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana;

Untuk mencapai Tujuan 3 Sasaran Strategis 1, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu ***Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana.***

Pencapaian IKU "***Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana***" sampai akhir tahun 2021 adalah sebesar **100,00 %**, ini artinya *Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana* adalah 326 Unit dibagi *Jumlah Seluruh Rumah Tangga Korban Bencana* 326 Rumah Tangga.

Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana, tercapai sesuai target sebesar 100,00 persen karena Pemerintah Kabupaten punya komitmen kuat untuk menangani semua korban bencana. Sebagai Pelaksana Teknis adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetapi tugas dan fungsi penanganan atau Indikator Kinerja Utama (IKU) melekat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan 3 Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni;

Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni;

Untuk mencapai Tujuan 3 Sasaran Strategis 2, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu ***Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.***

Pencapaian IKU "***Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni***" sampai akhir tahun 2021 adalah sebesar **102,72 %**, ini artinya *Jumlah Rumah Layak Huni* adalah 360.647 Unit dibagi *Jumlah Seluruh Rumah* adalah 455.551 Unit.

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Pencapaiannya Melampaui Target sebesar 102,72 persen.

Indikator 5 berhasil Melampaui Target karena Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, yang merupakan Cikal Bakal Rumah Layak Huni pada tahun 2021 telah ditangani sebanyak 2.442 rumah, yang terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

- ✓ 347 unit dari APBD Kab (Bansos),
- ✓ 799 unit dari (RTSTLH BTT),
- ✓ 420 unit dari (BSPS),
- ✓ 139 unit dari (DAK),
- ✓ 483 unit dari (ABPDProv),
- ✓ 4 unit dari (CSR),
- ✓ 243 unit dari (APBDDes),
- ✓ 5 unit dari (Lazisnu),
- ✓ 2 unit dari (BPD Jateng)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

Permasalahan yang terjadi dalam upaya pencapaian indikator antara lain, anggaran untuk program Rumah Tangga Layak Huni (RTLH) yang berasal dari APBD masih minim dan terjadinya perubahan data dasar (PBDT/Pemutakhiran Basis Data Terpadu). Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Banyumas harus memberikan *support* anggaran yang memadai untuk program penanganan RTLH dan harus melakukan pemutakhiran mandiri berbasis data terpadu.

Tabel 3.6
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian PK Tahun 2021



Analisis :

1. Semua Capaian Target/Realisasi dari 5 Indikator tercapai 100 % dan diatas 100 %
2. Indikator No.1 dan 5 tercapai diatas 100 % yaitu 102,97 % dan 102,72 %
3. Indikator No.2, 3 dan 4 tercapai sesuai Target yaitu 100 %

C. Perbandingan Capaian Indikator PK dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.7

NO	Indikator Kinerja 2020	Indikator Kinerja 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Naik/Turun (%)
1		Presentase Kinerja Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman	-	75,99	75,99
2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	99,982	99,983	0,0010
3	Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang	0,018	0,017	-0,0010
4	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana	85,2	100	14,80
5	Persentase Permukiman yang Tertata		9,32	-	-9,32
6	Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	78,76	79,17	0,41

Formulasi

Naik/Turun = Realisasi 2021-Realisasi 2020

Analisis :

1. Semua Indikator Trennya Positif dan mengalami kenaikan yang cukup bagus, kecuali Indikator nomor 3 dengan Tren Negatif (dimana semakin rendah realisasi semakin baik).
2. Indikator No.5 mengalami penurunan yang cukup signifikan, karena pada Tahun 2021, Indikator tidak dipakai karena menyesuaikan Permendagri 90 Tahun 2019

Tabel 3.8



D. Akuntabilitas Keuangan

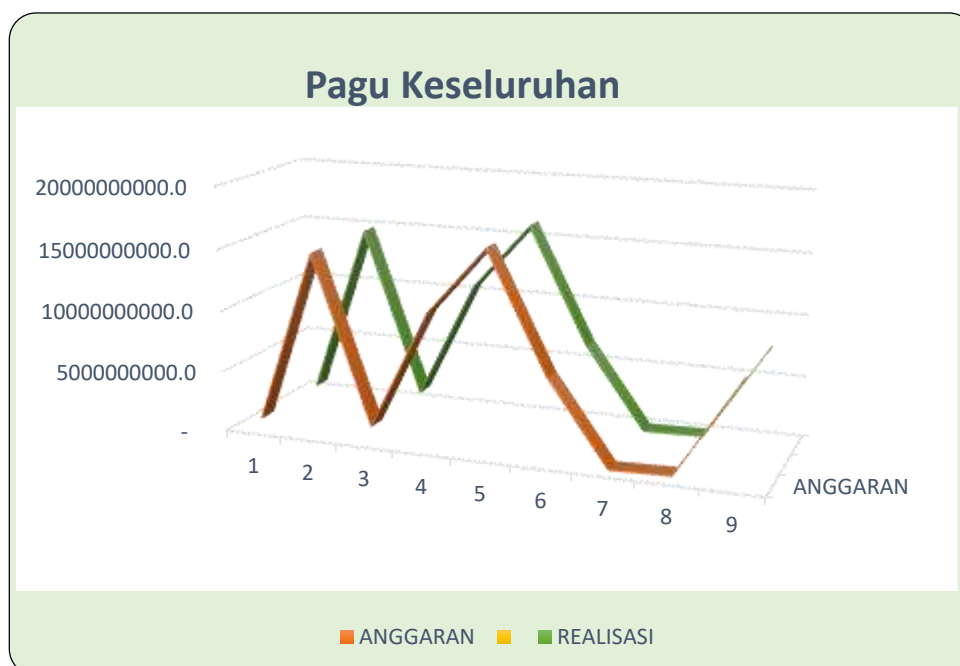
Tabel 3.9
Pagu Anggaran dan Realisasi Keseluruhan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	890.930.100	858.537.100	96,36%
2	Program Pengembangan Permukiman	14.894.996.000	14.792.063.489	99,31%
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.291.239.000	1.272.155.000	98,52%
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.911.427.000	10.835.161.310	99,30%
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.374.309.726	16.239.264.965	99,18%
6	Program Kawasan Permukiman	6.768.112.650	6.717.020.424	99,25%
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	61.311.000	49.774.307	81,18%
8	Program Penatagunaan Tanah	186.804.640	161.459.575	86,43%
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.792.053.054	7.587.493.585	97,37%
	JUMLAH (Rp)	59.171.183.170	58.512.929.755	98,89%

Formulasi

Capaian = Realisasi/Anggaran x 100

Tabel 3.10
Diagram Pagu Keseluruhan



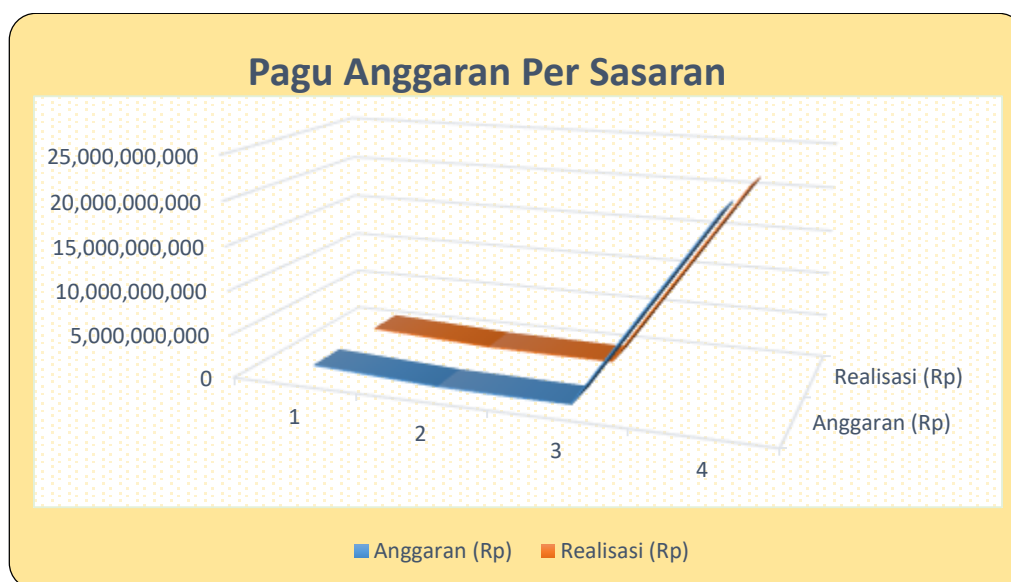
Tabel 3.11
Tabel Realisasi Program yang Mendukung PK

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program yang Mendukung PK		
			Nama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.291.239.000	1.272.155.000
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.911.427.000	10.835.161.310
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.374.309.726	16.239.264.965
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	61.311.000	49.774.307
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.792.053.054	7.587.493.585
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	890.930.100	858.537.100
		Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	Program Penatagunaan Tanah	186.804.640	161.459.575
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	0	0	0
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Permukiman	14.894.996.000	14.792.063.489
			Program Kawasan Permukiman	6.768.112.650	6.717.020.424

Tabel 3.12
Pagu Anggaran dan Realisasi Per Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program yang Mendukung PK	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman	36.430.339.780	35.983.849.167
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	890.930.100	858.537.100
		Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	186.804.640	161.459.575
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	0	0
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	21.663.108.650	21.509.083.913
JUMAH TOTAL			59.171.183.170	58.512.929.755

Tabel 3.13
Diagram Pagu Per Sasaran



Tabel 3.14
Tingkat Efektifitas

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja (%)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1	102,97	35.983.849.167	98,77
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	1	100,00	858.537.100	96,36
		Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	1	100,00	161.459.575	86,43
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	1	100,00	-	0,00
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	1	102,72	21.509.083.913	99,29

Formulasi
Prosentase = Realisasi/Anggaran x 100

Analisis :

- ✓ Tingkat Efektivitas Anggaran dihitung dengan cara Membandingkan Realisasi Anggaran Tiap Sasaran dengan Pagu Anggaran dikalikan 100 atau sama dengan Prosentase Realisasi Anggaran per Sasaran, dimana semakin Kecil Nilai Efektivitas semakin Baik
- ✓ Sasaran 1 Nilai Efektivitasnya 98,77 %
- ✓ Sasaran 2 Nilai Efektivitasnya 96,36 %
- ✓ Sasaran 3 Nilai Efektivitasnya 86,43 %
- ✓ Sasaran 4 Nilai Efektivitasnya 0,00 % (Sangat Efektiv)
- ✓ Sasaran 5 Nilai Efektivitasnya 99,29 %
- ✓ Rata-Rata Tingkat Efektivitas Seluruh Sasaran sebesar 76,17 %

Tabel 3.15
Tingkat Efisiensi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja (%)	Prosentase Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1	102,97	98,77	4,19
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	1	100,00	96,36	3,64
		Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	1	100,00	86,43	13,57
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	1	100,00	0	100,00
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	1	102,72	99,29	3,44

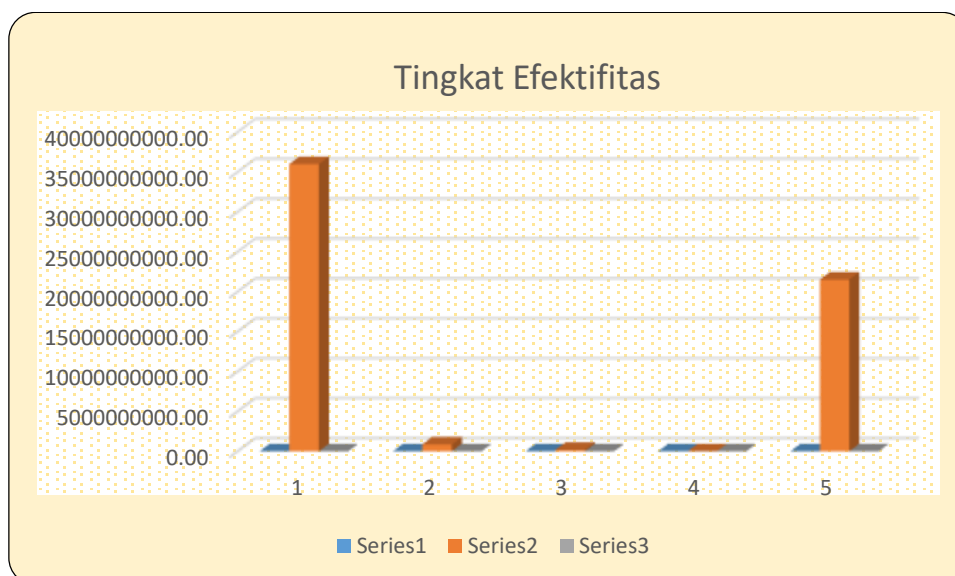
Formulasi

Tingkat Efisiensi = Capaian Indikator Kinerja - Prosentase Realisasi Anggaran

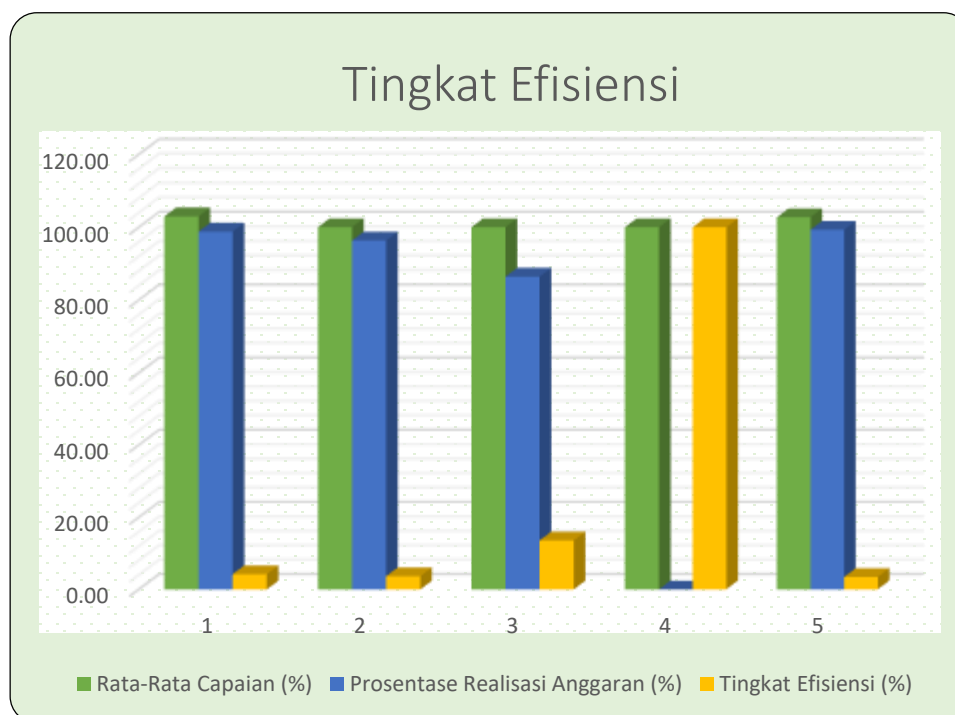
Analisis :

- ✓ Tingkat Efisiensi Anggaran dihitung dengan cara, Mengurangi Capaian Indikator Kinerja dengan Prosentase Realisasi Anggaran per Sasaran. Dimana semakin Besar Nilai Efisiensinya semakin Baik
- ✓ Sasaran 1 Nilai Efisiensinya 4,19 %
- ✓ Sasaran 2 Nilai Efisiensinya 3,64 %
- ✓ Sasaran 3 Nilai Efisiensinya 13,57 %
- ✓ Sasaran 4 Nilai Efisiensinya 100 % (Anggaran di BPBD, DINPERKIM hanya Tusinya)
- ✓ Sasaran 5 Nilai Efisiensinya 3,44 %
- ✓ Rata-rata Tingkat Efisiensi Anggaran seluruh Sasaran sebesar 24,97 %

Tabel 3.16
Diagram Tingkat Efektifitas



Tabel 3.17
Diagram Tingkat Efisiensi





BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menetapkan sebanyak 3 (tiga) Tujuan & 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman	<i>Presentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan Dan Permukiman</i>	%	73,80	75,99	102,97
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang</i>	%	99,983	99,983	100,00
		Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	<i>Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang</i>	%	0,017	0,017	100,00
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	<i>Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana</i>	%	100,00	100	100,00
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	<i>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</i>	%	77,07	79,17	102,72

- ✓ Sasaran 1 tercapai dengan nilai 102,97 %
- ✓ Sasaran 2 tercapai dengan nilai 100,00 %
- ✓ Sasaran 3 tercapai dengan nilai 100,00 %
- ✓ Sasaran 4 tercapai dengan nilai 100,00 %
- ✓ Sasaran 5 tercapai dengan nilai 102,72 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan, dan sangat signifikan .

Prestasi ini cukup menggambarkan kinerja SKPD yang efektif, efisien. Demikian juga dengan Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari 5 Sasaran Tingkat Efektifitas Anggaran Rata-rata sebesar 76,17 %

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-Rata Capaian (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1	102,97	35.983.849.167	98,77
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	1	100,00	858.537.100	96,36
		Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	1	100,00	161.459.575	86,43
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	1	100,00	-	0,00
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	1	102,72	21.509.083.913	99,29

Dari 5 Sasaran Tingkat Efisiensi Anggaran Rata-rata sebesar 24,97 %

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-Rata Capaian (%)	Prosentase Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1	102,97	98,77	4,19
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	1	100,00	96,36	3,64
		Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	1	100,00	86,43	13,57
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	1	100,00	0,00	100,00
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	1	102,72	99,29	3,44

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2021. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kritik dan saran kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk masa mendatang.

Purwokerto, Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS
ASEKBANG



Dr. Ir. IRAWADI, CES
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 199103 1 007

LAMPIRAN PK DINPERKIM 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Gerilya Barat No. 5 Purwokerto Kode Pos 53143
Telp. (0281) 640359 Fax.640359

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST., M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. ACHMAD HUSEIN**

Jabatan : Bupati Banyumas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, Januari 2021

PIHAK KEDUA

BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Gerilya Barat No. 5 Purwokerto Kode Pos 53143
Telp. (0281) 640359 Fax. 640359

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : KEPALA DINAS (ESELON IIB)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB BANYUMAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	1 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	99,983
2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	2 Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	%	0,017
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	3 Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	%	86,17
4	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata	4 Persentase Permukiman yang Tertata	%	9,68
5	Meningkanya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar	5 Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar	%	77,07

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	675.000.000
2	Program Pengembangan Permukiman	12.525.070.000
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.282.965.000
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.594.932.000
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.512.243.000
6	Program Kawasan Permukiman	6.790.613.000
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	70.000.000
8	Program Penatagunaan Tanah	250.000.000
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.016.329.616
	JUMLAH	58.717.152.616

BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

Purwokerto, Januari 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST.,M.Si.

LAMPIRAN

PK PERUBAHAN DINPERKIM 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Gerilya Barat No. 5 Purwokerto Kode Pos 53143
Telp. (0281) 640359 Fax.640359

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO., ST., M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. ACHMAD HUSEIN**

Jabatan : Bupati Banyumas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, Oktober 2021

PIHAK KEDUA

BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO., ST., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Jalan Gerilya Barat No. 5 Purwokerto Kode Pos 53143
 Telp. (0281) 640359 Fax. 640359

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
 JABATAN : KEPALA DINAS (ESELON IIB)
 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman	<i>Presentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan Dan Permukiman</i>	% 73,80
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang</i>	% 100
		Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	<i>Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang</i>	% 0,017
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	<i>Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana</i>	% 100
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	<i>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</i>	% 77,07

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	890.930.100	APBD
2	Program Pengembangan Permukiman	14.894.996.000	APBD
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.291.239.000	APBD
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.911.427.000	APBD+APBN
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.374.309.726	APBD+APBN
6	Program Kawasan Permukiman	6.768.112.650	APBD
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	61.311.000	APBD
8	Program Penatagunaan Tanah	186.804.640	APBD
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.792.053.054	APBD
	Jumlah	59.171.183.170	

Purwokerto, Oktober 2021

BUPATI BANYUMAS

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN


KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST.,M.Si